

BAB II

LANDASAN TEORITIK KONSEP STRATEGI PERSAINGAN LEMBAGA PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas tentang kerangka pemikiran, yang sering disebut sebagai kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini kemudian dapat diartikan sebagai suatu proses konseptualisasi yang mengantarkan pihak peneliti untuk menjabarkan kemungkinan jawaban yang akan ditemukan, atau kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dari rumusan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Uma Sekaran dalam *Business Research*, sebagaimana dikutip Sugiyono, menyatakan bahwa kerangka berfikir atau kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹

Menurut Mujamil Qomar, hal-hal yang menjadi masalah kelembagaan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang semestinya. Jika tidak permasalahan yang dihadapi sebageian besar lembaga pendidikan Islam akan menyimpan potensi dalam menghambat, dan dalam batas-batas tertentu akan bisa mengancam terhadap eksistensi, keberlangsungan, kemampuan bersaing, dan kemajuan pada sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut.²

Dari sekian banyak lembaga pendidikan Islam baik dari lembaga pendidikan dini hingga lembaga pendidikan tinggi dalam beberapa tahun belakangan ini telah mulai muncul kesadaran dengan bentuk melakukan upaya-upaya strategis yang ditujukan untuk mengatur, memperbaiki, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan sebuah lembaga pendidikan Islam yang maju dan bisa menjawab unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 60.

² Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. xvii.

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teoritik dan kerangka berpikir yang berhubungan dengan judul. Uraian yang berkaitan dengan upaya-upaya yang bersifat strategis yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam tersebut.

B. Lembaga Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan

Definisi mengenai pendidikan sangat beragam dan masing-masing batasan pengertian pendidikan yang dimunculkan itu bersandar pada latar belakang pemikiran dan perspektif yang beragam pula. Meski definisi tentang pendidikan beragam namun pada dasarnya memiliki kesamaan seperti dikemukakan oleh Driyarkara yang menyebutkan bahwa *pendidikan adalah memanusiakan manusia muda*. Sementara itu pemahaman mengenai pendidikan secara umum bisa dibagi menjadi dua (2) yaitu; pendidikan yang diartikan secara sempit dan pendidikan yang diartikan secara luas.³

Mengutip Ahmad D. Marribah dalam *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Rasi'in memberi pengertian pendidikan dalam arti sempit yaitu "bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sampai ia (anak-anak) dewasa." Sementara pendidikan dalam arti luas dinyatakan sebagai segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada gilirannya ia (anak) menjadi orang pandai, baik, mampu hidup, dan berguna bagi masyarakat.⁴

Istilah lain untuk pendidikan adalah *pedagogik* yang berasal dari kosakata bahasa Yunani *paidagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Dari istilah *paidagogia* ini kemudian memunculan istilah

³ Rasi'in, "Pendidikan Islam di Indonesia Pada Zaman Belanda", dalam Abudin Nata (Ed.), *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2003, hlm. 10.

⁴ M. Natsir Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*, Mutiara, Jakarta, 1997, hlm. 23.

pedagogos. Istilah yang terakhir ini berasal dari gabungan dua kata yakni *paedos* yang berarti anak, dan *agogos* yang mempunyai arti “saya membimbing” atau ‘memimpin’.⁵ Maka *paedogod* selanjutnya mempunyai arti seorang nelayan atau bujang yang dalam masa Romawi kuno menjalankan pekerjaan sebagai pengantar dan penjemput anak-anak menuju dan pulang dari tempat belajar. Selain itu ketika di dalam rumah, para anak-anak tersebut selalu berada dalam pengawasan dan penjagaan para *pedagogos* ini.⁶

Secara umum pendidikan dapat dipahami ke dalam dua pengertian yaitu pengertian secara luas (tidak terbatas) dan pengertian secara sempit atau terbatas. Pengertian pendidikan secara luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang kehidupan yang dijalani oleh manusia sehingga bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu.⁷

Jika dicermati batasan dan definisi yang disampaikan di atas mengandung pengertian yang luas yaitu menyangkut perkembangan dan pengembangan manusia. Pengertian di atas juga masih terbatas pada persoalan-persoalan yang bersifat keduniawian, karena belum memasukkan aspek spiritual-religius sebagai bagian penting yang mendasari perkembangan dan pengembangan manusia dalam suatu proses pendidikan.

Saiful Sagala dengan mengutip dari *Webster's New World Dictionary* menyebutkan pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya yang menjadi karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki

⁵ M. Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1988, hlm. 1.

⁶ Didin Kurniadin & Imam Machali, *Manajemen Pendidikan, Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta, hlm. 111.

⁷ Redja Mudyahardjo, *Pengantar pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

sifat dan sasarannya adalah manusia.⁸ Juga Fatah Syukur dengan melansir dari *Dictionary of Education* menyatakan, pendidikan adalah;

- a. Proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup
- b. Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.⁹

Tokoh pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara juga memberikan pendapatnya mengenai pendidikan. Seperti dilansir Abudin Nata, disebutkan pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Selain itu, dalam konteks prakteknya pendidikan tidak hanya disikapi dan ditempatkan sebagai pelaku pembangunan tetapi juga sebagai alat perjuangan. Pendidikan adalah memelihara hidup ke arah kemajuan. Pendidikan merupakan usaha kebudayaan, berbasas peradaban, yaitu memajukan hidup agar bisa mempertinggi derajat kemanusiaan.¹⁰

Menyikapi pendapat Ki Hadjar Dewantara itu, Abudin Nata menyatakan bahwa rumusan pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara itu memberi kesan dinamis, modern, dan progresif. Dengan berpegang kepada pemahaman mengenai pendidikan seperti itu maka dalam pendidikan tidak boleh hanya memberikan bekal untuk membangun, namun juga sejauh mana pendidikan yang diberikan tersebut berguna dalam menunjang kemajuan bangsa. Semangat progresif yang terkandung dalam rumusan Ki Hadjar Dewantara itu mengingatkan bahwa anak muda adalah generasi yang akan datang, dan apa yang dihadapi oleh anak muda di masa datang akan berbeda dengan yang terjadi dan berlangsung sekarang. Karena itu

⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 1.

⁹ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 11.

¹⁰ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 9.

apa yang diberikan dan diajarkan kepada para anak didik harus memperkirakan relevansi dan kegunaannya di masa mendatang.¹¹

Soegarda Purbawakaca juga memberi pengertian tentang pendidikan yang menurutnya pendidikan adalah sesuatu yang mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapann, serta keterampilannya kepada generasi muda guna melakukan dan melaksanakan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya.¹²

Dari definisi tentang pengertian pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Purbawakaca di atas, di dalamnya mempunyai dimensi yang cukup luas bahwa dalam pendidikan terdapat hal-hal utama seperti pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup. Namun jika dicermati secara lebih teliti dan mendalam lagi hal-hal yang dikemukakan dari kedua pengertian tersebut dinilai masih bersifat umum dan material karena belum menyentuh aspek spiritual yang dilandasi ajaran agama.

Dalam perspektif bahasa Indonesia, kata “pendidikan” adalah sebuah istilah yang menerangkan suatu kegiatan yang bersifat aktif dari kata dasar “didik”. Secara umum dan mendasar, “pendidikan” berarti suatu usaha manusiawi untuk memanusiakan manusia agar tumbuh dan berkembang ke arah yang sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri.¹³ Pengertian ini dikembangkan dimana pendidikan diartikan sebagai upaya pengembangan terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi; moral, intelektual, fungsi inderawi, yang diarahkan demi tujuan kehidupan manusia dan masyarakat. Selain itu juga pendidikan juga dipahami sebagai rangkaian proses yang terus-menerus yang diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui perencanaan, materi sistem, dan strategi kegiatan tertentu.¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² Rasi'in, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹³ Bambang Sumardjoko dkk., *Pengantar Pendidikan*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS, Surakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.*

Dalam perspektif politik pendidikan yang dijadikan sebagai landasan kebijakan suatu negara/pemerintah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengertian tentang pendidikan ini juga dibakukan. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada Pasal 1 ayat (1) dari UU tersebut dicantumkan pengertian pendidikan yaitu; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁵ Selain memberikan batasan tentang pengertian pendidikan, di dalam UU No. 20 Tahun 2003 itu juga memberikan pengertian/batasan mengenai Pendidikan Nasional yang diartikan sebagai suatu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.¹⁶

2. Pendidikan Islam

Membahas tentang pendidikan maka di dalamnya tersedia sangat banyak ruang mengenai jenis-jenis pendidikan itu sendiri. Hal ini dikarenakan sasaran utama dari pelaksanaan adalah manusia yang secara kodrati terbagi ke dalam keberagaman tempat, sosial, budaya, keyakinan, ekonomi, dan lain-lain. Dengan begitu pandangan tentang pendidikan memang tidak terlepas dari kenyataan dan perspektif nilai yang dianut oleh suatu kolektivitas manusia, di antaranya adalah pendidikan Islam.

Dalam khasanah pendidikan Islam terdapat sejumlah istilah yang merujuk langsung pada pengertian pendidikan. Beberapa istilah yang mewakili di antaranya seperti yang sudah disinggung sebelumnya yaitu

¹⁵ *Undang-Undang RI Nomor: 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003*, CV Minijaya Abadi, Jakarta, 2003, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*

tarbiyah dan *ta'dib*. Istilah lain yang juga berhubungan dengan pengertian pendidikan dalam lingkup pendidikan Islam adalah *tabyin* dan *tadris*.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak ditemukan ayat yang berisi perintah untuk belajar dan berpikir. Seperti dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah; 20: bahwa pengangkatan manusia sebagai khalifah di bumi adalah berkaitan langsung dengan pengajaran dan pendidikan dari Allah kepada Nabi Adam. Bahwa keunggulan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain terletak pada aspek kemampuan manusia dalam menyebutkan nama-nama atau dalam menjelaskan konsep-konsep sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada manusia sebelumnya.¹⁷

H. Maksun Mukhtar dengan mengutip Majid Irsan al-Kailani dalam *Tatawwur Mafhum al-Nazariyyah al-Tarbawiyah*, menyatakan bahwa dalam menggali suatu istilah beberapa kalangan memulai dengan cara melakukan pembahasan terhadap kata/istilah yang menyangkut hubungan derivasi dan makna aslinya.¹⁸ Untuk selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap teks-teks yang dinilai memiliki otoritas yang berkaitan dengan istilah/kata yang dibahas itu.

Hal yang sama juga dilakukan dalam mencari pengertian pendidikan Islam. Salah satu istilah yang dipakai adalah *tarbiyah*. Istilah ini banyak dipergunakan para penulis kontemporer Muslim sehingga cukup banyak hasil pemikiran dan tulisan yang menjelaskan teori pendidikan dengan istilah *at-Tarbiyat al-Islamiyah*.¹⁹ Di antaranya Umar Yusuf Hamzah yang dalam *Ma'alim al-Tarbiyah fi Al-Qur'an wa al-Sunnah* menyatakan, dilihat dari penggunaan bahasa Arab secara umum, kata *tarbiyah* dapat dikembalikan kepada tiga kata kerja: 1) kata *raba-yarbu* yang berarti berkembang; 2) kata *rabiya-yarba*, yang berarti

¹⁷ Maksun Mukhtar, *Madrasah, Sejarah & Perkembangannya*, Logos, Jakarta, 1999, hlm. 11-12.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁹ Turunan penggunaan istilah *tarbiyah* mewakili pendidikan dalam Islam ini selanjutnya dipergunakan dalam politik pemerintahan misalnya nama kementerian yang mengurus masalah pendidikan di beberapa negara Arab menggunakan istilah *Wizarat al-Tarbiyah*. Di Indonesia dalam praktik penyelenggaraan pendidikan juga melakukan hal sama di antaranya dengan keberadaan fakultas *tarbiyah* (pendidikan) di perguruan tinggi Islam negeri dan swasta. *Ibid.*

tumbuh; dan 3) *rabba-yarubbu*, yang mengandung arti memperbaiki. Dengan berdasar pada pemahaman ini Hamzah menyatakan bahwa tarbiyah mempunyai unsur-unsur pokok; a) Memelihara fitrah anak dan memantapkannya dengan penuh perhatian, b) Menumbuhkan aneka ragam bakat anak dan kesiapannya, c) Mengarahkan fitrah dan bakat anak menuju kepada yang lebih baik, dan d) Melakukan kesemuanya dengan secara bertahap.²⁰ Sementara itu Abdurrahman al-Bani menyatakan, dalam *tarbiyah* terdapat tiga unsur; menjaga dan memelihara anak, mengembangkan bakat dan potensi anak sesuai dengan kekhasan masing-masing, dan mengarahkan potensi dan bakat agar bisa mencapai kebaikan dan kesempurnaan.²¹

Istilah lain yang digunakan adalah *al-ta'lim* yang memberi pengertian sebagai suatu proses memberikan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi pembersihan diri (*tazkiyah*) dari segala kekotoran dan menjadikan seseorang dalam kondisi siap menerima hikmah dan mempelajari segala sesuatu yang belum diketahui dan bergunanya bagi dirinya. Dengan begitu *ta'lim* mencakup proses yang berlangsung sejak kecil sampai akhir hayat. Untuk itu hal-hal yang terkandung di dalamnya lebih luas dibanding dengan tarbiyah yang terbatas pada pendidikan dan pengajaran di masa pertumbuhan dan perkembangan manusia saja.²²

Selanjutnya ada yang menilai jika istilah *al-ta'lim* merupakan bagian dari tarbiyah, seperti yang diungkapkan M. Atiyah al-Abrasy seperti dikutip H. Maksu, bahwa *al-ta'lim* merupakan bagian dari tarbiyah karena *al-ta'lim* hanya menyangkut domain kognitif. Sementara Syed Muhammad Naguib al-Attas menganggap term *al-ta'lim* lebih dekat kepada pengajaran, bahkan dikatakan juga bahwa aspek kognitif yang

²⁰ H. Maksu Mukhtar dari Umar Yusuf Hamzah dalam *Ma'alim al-Tarbiyah fi Al-Qur'an wa al-Sunnah*, Dar Usamah, Yordania, 1996, hlm. 6 & 9. Lihat *Ibid.*, hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

²² *Ibid.*, hlm. 18.

dijangkau dalam *al-ta'lim* tidak memberikan porsi pengenalan secara mendasar.²³

Teori-teori mengenai pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia secara umum memberikan definisi dalam dua tataran yaitu tataran idealis dan tataran pragmatis. Dalam tataran idealis, pendidikan Islam dinyatakan sebagai suatu sistem independen dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam. Definisi seperti ini dipengaruhi secara kuat oleh literatur Arab yang masuk baik dalam bentuk teks asli, terjemahan, maupun karya saduran. Sementara dalam tataran pragmatis, pendidikan Islam ditempatkan sebagai identitas atau ciri khusus yang tetap berada dalam konteks pendidikan nasional.

Dalam konteks Indonesia, para pemerhati dan praktisi pendidikan di Indonesia berusaha menjelaskan pengertian pendidikan Islam dengan melihat tiga kemungkinan hubungan antara “konsep pendidikan” dan “konsep Islam”. Dengan begitu maka secara umum menyatakan pendidikan Islam dipahami sebagai; 1) *Pendidikan (menurut) Islam*, 2) *Pendidikan (dalam) Islam*, dan 3) *Pendidikan Islam*. Dalam hal Pendidikan Islam sebagai pendidikan menurut Islam adalah bersifat normatif, sementara dalam pengertian sebagai pendidikan dalam Islam adalah bersifat sosiologis. Sementara untuk yang terakhir berarti pendidikan Islam yang lebih bersifat proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran Islam.²⁴

Selanjutnya ada beberapa definisi tentang pendidikan Islam ini. Disebutkan menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.²⁵ Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam

²³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁵ Zuhairini, dkk. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Usaha Offset Printing, Surabaya, 1983, hlm. 27.

sebagaimana termaktub dalam Al- Qur'an dan terjabar dalam sunnah Rasul.²⁶ Pengertian selanjutnya dari pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan ruhani berdasarkan hukum-hukum agama Islam untuk menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.²⁷ Dari semua definisi di atas pada intinya ialah suatu usaha mengajar dan mendidik anak yang didasarkan pada ajaran Islam.

Menurut M. Atiyah al-Abrasy tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa dengan pertimbangan akhlak keagamaan merupakan akhlak yang tertinggi, sementara akhlak yang mulia adalah tiang pendidikan Islam.²⁸ Dengan demikian maka pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dan terintegrasi dengan pendidikan akhlak. Pendidikan Islam memegang peranan penting berkenaan dengan akhlak, oleh karena itu berbicara pendidikan Islam baik makna maupun tujuannya harus mengacu pada penanaman nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial (moralitas sosial).

3. Lembaga Pendidikan Islam

Sebelum menguraikan tentang lembaga pendidikan Islam, terlebih dahulu harus diketahui pengertian dasarnya dari sudut arti kata dan arti kebahasaan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata 'lembaga' mengandung pengertian yang beragam dan salah satunya menyatakan lembaga adalah badan atau organisasi yang keberadaan dan tujuannya melakukan, menyelenggarakan, dan mengurus sesuatu usaha.²⁹ Dengan demikian lembaga pendidikan kemudian dapat diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang keberadaannya ditujukan untuk melakukan, menyelenggarakan, dan mengurus pendidikan. Dalam bentuk formalnya, lembaga pendidikan ini bisa terwujud dalam bentuk institusi sekolah,

²⁶ Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 13.

²⁷ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al Ma'arif, Bandung, 1980, hlm. 23.

²⁸ Moh. Athiyyah al-Abrasyi, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 221.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 512.

perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga formal lainnya seperti lembaga kursus pelatihan dan keterampilan dan lain-lain.

Pengertian seperti di atas untuk selanjutnya dapat dikembangkan dalam memberikan pengertian mengenai lembaga pendidikan Islam. Menurut penulis, pengertian lembaga pendidikan Islam adalah suatu badan atau organisasi yang keberadaannya ditujukan untuk melakukan, menyelenggarakan, dan mengurus suatu proses pendidikan yang bersandar kepada nilai-nilai dan ajaran Islam. Sementara itu dalam wujud formalnya lembaga pendidikan Islam dapat dilihat pada institusi madrasah, pesantren, dan institusi-institusi pendidikan formal lain yang mendasarkan visi dan misinya dengan bersandar dan bersumber dari ajaran agama Islam.

Dalam tinjauan fungsionalnya, suatu lembaga pendidikan harus menjalankan peran sebagai sarana untuk melaksanakan pelayanan dan proses pendidikan. Seperti dinyatakan Saiful Sagala, bahwa lembaga pendidikan tidak hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul guru dan peserta didik semata namun idealnya menjadi suatu wahana dalam menjalankan suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Melansir H. Nawawi dalam *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Saiful Sagala juga menyatakan sekolah tidak sekedar diartikan sebagai ruangan/gedung saja, akan tetapi seharusnya mempunyai peran dan fungsi yang lebih luas dari itu. Ini sejalan dengan Postman dan Weingartner; “*School as institution is specific set of essential function in serves in our society*”, bahwa lembaga pendidikan (sekolah dan lain-lain) sebagai institusi spesifik dan seperangkat fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat.³⁰

Masih dalam tinjauan fungsional lembaga pendidikan, bahwa sekolah, madrasah, dan pesantren merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan dan memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Salah satu ciri dari kompleksitas dan dinamika itu adalah lembaga pendidikan tidak lagi dipahami sebagai tempat berkumpul pihak pengajar

³⁰ Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hlm. 70.

dan peserta didik semata, melainkan juga sebagai suatu organisasi yang menuntut pengelolaan dari para profesional sehingga sanggup memberi jaminan dalam menghasilkan para lulusan berkualitas yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.³¹

Dalam konteks Indonesia, pendirian lembaga pendidikan Islam dalam berbagai bentuk dan coraknya merupakan sebagai bentuk upaya pendidikan kepada masyarakat secara terbuka. Husni Rahim³² dengan melansir dari Karel A. Steenbrink dan Martin van Bruinessen menyebutkan, sebelum kemunculan pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang eksis di Nusantara cenderung eksklusif. Steenbrink dan Bruinessen menyatakan, pada masa pra-Islam selain para ruhaniawan Hindu-Budha, tidak semua orang bisa mengikuti pendidikan yang terlembagakan. Selanjutnya di masa kolonial Hindia Belanda, keberadaan dan eksistensi dari berbagai lembaga pendidikan yang didirikan pada mulanya lebih diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan penjajah. Keadaan seperti ini jelas berbeda dengan pendirian madrasah, pesantren, dan sekolah Islam yang sejak semula bersifat terbuka bagi masyarakat.³³

Maka dalam perspektif kesejarahan Husni Rahim menyebutkan, eksistensi dan perkembangan pendidikan dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia berasal dari proses interaksi misi Islam dengan tiga (3) kondisi yaitu; *Pertama*, interaksi Islam dengan budaya lokal yang pra-Islam sehingga dari fase dan kondisi ini pendidikan Islam memunculkan lembaga pendidikan Islam yang bernama pesantren. Meski pandangan ini masih menimbulkan kontroversi akan tetapi jika merunut pada aspek kesejarahannya bagaimanapun juga institusi pesantren tidak bisa dilepaskan dari proses akulturasi Islam dalam konteks budaya asli

³¹ *Ibid.*, hlm. 70-71.

³² Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

³³ Tentang keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang dilansir Husni Rahim ini lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, LP3ES, Jakarta, 1986 dan *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999; juga Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, Mizan, Bandung, 1995.

(*indigenous*). *Kedua*, interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern yang kemudian melahirkan lembaga pendidikan Islam yang bernama madrasah.³⁴ Dan *ketiga*, interaksi misi pendidikan Islam dengan kebijakan politik pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang pada kelanjutannya memunculkan lembaga pendidikan Islam dalam bentuk sekolah-sekolah Islam atau madrasah.³⁵

Sementara itu Maksum Mukhtar menyatakan latar belakang pertumbuhan lembaga pendidikan Islam di Indonesia utamanya lembaga madrasah disebabkan oleh dua hal:

- a. Faktor pembaharuan Islam yang mendasarkan kepada hal-hal seperti; a) keinginan kembali kepada Al-Qur'an dan hadits, b) semangat nasionalisme dalam melawan penjajah, c) keinginan untuk memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan d) pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.
- b. Respons terhadap politik pendidikan yang ditempuh dan diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang tidak memihak kalangan rakyat jelata dan kalangan Islam Indonesia.³⁶

Lembaga pendidikan Islam yang populer di Indonesia selain pesantren adalah lembaga pendidikan madrasah. Ketika Departemen Agama RI berdiri pada 3 Januari 1946, terdapat *Bagian Pendidikan* dalam departemen ini yang memiliki “pilot project” untuk mengadakan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan agama atau madrasah milik pemerintah secara partikelir dengan maksud menjadi contoh bagi pihak di

³⁴ Penggunaan istilah “madrasah” sebagai lembaga pendidikan Islam ini mulai muncul pada paruh akhir 1910-an. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Muhammadiyah, demikian juga organisasi Islam NU yang mendirikan madrasah-madrasah di Surabaya. Lihat Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Logos, Jakarta, 2001, hlm. 194.

³⁵ Kemudian mungkin sekali muncul pertanyaan apa perbedaan antara madrasah dan sekolah Islam? Dalam perspektif kesejarahan maka pertanyaan ini bisa dijawab; bahwa kedua lembaga pendidikan itu lahir dari dua inspirasi yang berbeda dimana madrasah lahir dari prakarsa yang dipengaruhi oleh ideologi pemikiran Timur Tengah modern, sementara sekolah Islam muncul sebagai bagian dari gerakan kooperatif dengan kebijakan politik pendidikan yang ditempuh oleh pemerintah kolonial yang tentunya sangat dipengaruhi oleh alam pikiran ala Barat. Husni Rahim, *Op. Cit.*, hlm. 8.

³⁶ Maksum Mukhtar, *Madrasah, Sejarah & Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 81-96.

luar pemerintah yang akan mengelola suatu lembaga pendidikan Islam. Maka pembinaan pertama terhadap madrasah dan pesantren pada kurun waktu ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946 pada 19 Desember 1946. Dalam peraturan itu dijelaskan madrasah adalah tiap-tiap tempat pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya.³⁷ Peraturan ini juga memuat jenjang pendidikan madrasah yaitu: 1) Madrasah Tingkat Rendah, dengan durasi belajar sekurang-kurangnya 4 tahun dan para siswa yang mengikuti proses pembelajaran pada tingkat ini adalah yang berumur 6-15 tahun; 2) Madrasah Lanjutan dengan masa belajar selama 3 tahun dengan persyaratan telah menamatkan pendidikan Madrasah Tingkat Rendah.³⁸

Meskipun keberadaan dan pembinaan madrasah telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama di atas, namun hingga tahun 1950-an lembaga madrasah masih dikonotasikan sebagian besar masyarakat sebagai lembaga pendidikan formal yang dibedakan dengan “sekolah” yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Hal ini terjadi karena perbedaan filosofi antara madrasah dengan sekolah umum, dimana filosofi pendidikan di madrasah ditujukan untuk mendidik anak agar mengetahui ajaran agama dan kemudian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian tujuan pendidikan di madrasah adalah menekankan kepada dimensi moral dan spiritual, dan dalam kurun waktu ini madrasah tidak atau belum mementingkan tujuan untuk mendapatkan ijazah atau pada para peserta didiknya tidak ditanamkan keinginan untuk memperoleh pekerjaan atau menjadi pegawai negeri.

Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1946 kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 1952 yang isinya di antaranya menyatakan: 1) Madrasah Rendah (kemudian dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah)³⁹ mempunyai masa

³⁷ Husni Rahim, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Berdasarkan Ketetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1959 dinyatakan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan Sekolah Rendah Islam ini diserahkan kepada Kementerian Agama dan namanya

belajar selama 6 tahun; 2) Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah [MTs]) menjalani masa belajar selama 3 tahun; dan 3) Madrasah Lanjutan Atas (Madrasah Aliyah) dengan waktu belajar selama 3 tahun.⁴⁰

Semenjak pertama kali diadakan pada tahun 1946 hingga memasuki periode tahun 1960-an status lembaga pendidikan Islam dalam institusi madrasah masih berstatus sebagai lembaga pendidikan Islam swasta. Baru pada tahun 1967 Madrasah Tsanawiyah dinegerikan dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN). Selanjutnya berdasar Keputusan Menteri Agama No. 15, 16, dan 17 tahun 1978 nama MTsAIN diganti dengan MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri). Pemberian status negeri kepada beberapa lembaga pendidikan Islam setingkat Madrasah Tsanawiyah ini ditujukan sebagai model bagi madrasah-madrasah tsanawiyah swasta yang ada pada kurun waktu itu. Hal yang sama juga yang dialami lembaga pendidikan Islam setingkat Madrasah Aliyah, yang baru di tahun 1967 itu juga didirikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).⁴¹

C. Problematika dan Pengembangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu proses yang mendidik para peserta didiknya dengan berdasar pada nilai spiritual dan etis Islam. Pendidikan seperti ini tidak bisa ditanamkan/diterapkan dalam suatu masyarakat yang tidak menempatkan aspek agama sebagai landasan spiritual dan etisnya seperti pada masyarakat di Barat karena pendidikan dalam perspektif Barat lebih menekankan kepada akal dan rasionalitas, dan hampir tidak memberi ruang pada nilai dan ajaran spiritual.

pun diubah dari MI menjadi SRI (Sekolah Rakyat Islam). Selanjutnya berdasar pada Keputusan Menteri Agama No. 104 tahun 1962 SRI diubah namanya menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). *Ibid.* hlm. 55.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 54-55.

⁴¹ Husni Rahim kemudian memberikan catatan; khusus MTs Negeri yang baru berdiri pada tahun 1967 itu hingga memasuki tahun 1970 jumlahnya sebanyak 182 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu sepuluh tahun kemudian jumlahnya berkembang dengan sangat pesat yaitu sebanyak 470 buah. *Ibid.*, hlm. 55.

Dalam perspektif global dan ideologis, pendidikan agama dan lembaga pendidikan Islam mendapat tantangan dan permasalahan eksternal, dengan bentuk tidak disertakannya ilmu spiritual/keagamaan (termasuk Islam) ke dalam pembagian cabang pengetahuan. Hal ini terlihat ketika dilangsungkan pertemuan perguruan tinggi-perguruan tinggi Amerika Serikat di Universitas Harvard di tahun 1957. Salah satu dari hasil pertemuan itu adalah membagi ilmu pengetahuan ke dalam tiga kategori yaitu: ilmu-ilmu sastra, ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu sosial. Dan ilmu-ilmu agama tidak dimasukkan ke dalam pembagian cabang ilmu pengetahuan.⁴²

Sementara itu dampak westernisasi dan globalisasi sebagai bagian utama peradaban modern juga memunculkan problem internal pendidikan Islam, diantaranya dengan melahirkan dualisme penyikapan mengenai orientasi pendidikan antara golongan tradisonalis dan golongan modernis. Suatu sistem pendidikan Islam tradisional hanya melahirkan golongan Islam tradisional, demikian pula sebaliknya dengan pendidikan sekuler. Melihat hal ini Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf menilai bahwa kedua kelompok utama tersebut tidak pernah berusaha untuk menyusun suatu sistem pendidikan Islam bersama.⁴³

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, secara umum dihadapi persoalan terkait dengan permasalahan dalam pendidikan Islam dan arah pengembangan pendidikan Islam. Beberapa hal yang bisa diuraikan terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Pendidikan Islam

Meski penyelenggaraan pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam di Indoensia telah berlangsung lama dan eksistensinya cukup dominan serta tersebar di berbagai pelosok, namun keberadaannya masih menghadapi masalah-masalah. Dalam pandangan Husni Rahim hal-hal yang menjadi menjadi persoalan yang dihadapi itu adalah:

⁴² Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam*, Penerbit Risalah, Bandung, 1986, hlm. 3.

⁴³ *Ibid.* hlm. 4.

Pertama, lokasi penyelenggaraan pendidikan Islam kebanyakan di pedesaan, pinggiran, perkampungan, bahkan di kawasan kumuh. Keadaan ini kemudian memberi kesan pendidikan Islam identik dengan kelompok masyarakat marjinal. Realitas seperti ini mayoritas dialami lembaga pendidikan Islam yang berstatus swasta. Selebihnya adalah madrasah negeri yang pengelolaannya di bawah Departemen Agama dengan keadaannya relatif lebih baik, namun begitu lokasi madrasah-madrasah negeri di bawah pengelolaan pemerintah ini juga tidak begitu banyak yang berlokasi di pusat kota dan sebagian besar dari mereka berlokasi daerah sub-urban atau kawasan pinggiran kota.⁴⁴

Kedua, ketimpangan jumlah lembaga pendidikan madrasah antara madrasah yang berstatus negeri dan swasta. Dalam catatan di awal tahun 2000-an khusus untuk madrasah tingkat menengah pertama atau MTs terdapat jumlah persentase yaitu jumlah MTs yang berstatus negeri adalah 24,3% sementara untuk madrasah dengan status sebagai madrasah swasta sebanyak 75,7%. Keadaan seperti ini tentu sangat berbeda dengan yang dialami oleh SLTP yang berada dalam naungan Departemen Pendidikan yang didapatkan angka 44,9% berstatus sebagai SLTP negeri dan sisanya 55,9% berstatus SLTP swasta.⁴⁵ Dari jumlah perbandingan di atas, lembaga-lembaga yang ada baik MTs negeri/swasta dan SMP negeri/swasta harus memperebutkan minat dari lulusan para lulusan SD negeri dan swasta dan MI negeri/swasta.

Ketiga, latar belakang keluarga siswa di madrasah yang sebagian besar berlatar belakang keluarga yang kurang mampu atau dari kalangan masyarakat biasa. Keadaan seperti ini sebagai besa dialami oleh madrasah swasta karena lembaga pendidikan Islam ini berlokasi di kawasan pinggiran dan pedesaan. Dengan keadan yang demikian itu maka pada sebagian besar madrasah, utamanya madrasah-madrasah swasta

⁴⁴ Husni Rahim, *Op. Cit.*, hlm. 163.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

menyelenggarakan proses pendidikan dengan kondisi yang sangat sederhana dan terbatas.⁴⁶

Keempat, kendala dan permasalahan pada internal madrasah terkait dengan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Hal pertama yang terkait dengan SDM adalah kualitas guru madrasah yang dinilai masih kalah dengan guru-guru sekolah umum. Memang dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya kualitas SDM para pendidik di lingkungan madrasah utamanya MTs sudah lebih baik, namun perkembangan ini belum mengubah sama sekali persepsi lama yang menyatakan kualitas SDM guru di MTs masih kalah dengan SDM guru di SMP umum. Terkait dengan SDM tenaga pendidikan ini Husni Rahim memberikan tiga kategori;

- a. Kategori guru tidak layak yang bisa dikategorikan *unqualified* maupun *under-qualified*. Pengertiannya, guru-guru yang termasuk dalam kategori ini belum mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dituntut oleh perundang-undangan yang berlaku. Misalnya untuk menjadi tenaga pendidik MTs seorang guru harus berpendidikan S-1, dalam kenyataannya masih cukup banyak tenaga pengajar di lingkungan MTs yang berlatar belakang pendidikan bukan lulusan perguruan tinggi.
- b. Kategori guru yang memiliki kemampuan dan kelayakan sebagai tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan juga sesuai dengan yang dihendaki peraturan (misalnya lulusan S-1) namun latar belakang pendidikannya itu tidak sesuai dengan bidang pelajaran yang dipegangnya alias *mismatch*.
- c. Kategori guru yang layak kemampuan dan sesuai antara latar belakang pendidikan dan bidang pelajaran yang dipegang. Dari data pada awal periode tahun 2000-an didapatkan catatan hampir 60% guru madrasah yang mengajar di MTs negeri yang termasuk dalam kategori guru yang tidak layak, dan angka ini semakin membesar pada kasus

⁴⁶ *Ibid.*

madrasah/MTs swasta yang menunjukkan 80% tenaga pendidiknya masuk dalam kategori tidak layak. Sementara tenaga pendidik yang masuk dalam kategori dua (layak mengajar tapi *mismatch*) didapat angka sebanyak 20% pada madrasah/MTs negeri, dan hanya terdapat 20% guru layak pada MTs negeri sementara untuk madrasah/MTs swasta tentu jumlahnya lebih sedikit lagi.⁴⁷ Dengan melihat pada kategorisasi berikut catatan jumlah persentase di atas maka segera bisa dilihat tenaga pengajar ini yang menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh lembaga pendirian madrasah utamanya pada madrasah-madrasah swasta.

Selain persoalan aspek SDM pengajar, madrasah juga menghadapi masalah dalam ketersediaan sarana dan prasarana seperti bangunan gedung, meski keadaannya sudah mulai membaik pada saat ini. Mungkin hanya aspek ini yang mulai menunjukkan perkembangan dan perbaikan, tapi masih banyak gedung madrasah yang berdiri dengan sederhana dan ala kadarnya. Sementara sarana dan prasarana penunjang laboratorium, perpustakaan, dan unit-unit lain umumnya masih tertinggal dibanding dengan sekolah-sekolah umum.⁴⁸ Hanya sedikit madrasah, utamanya MTs, yang punya sarana penunjang pendidikan seperti itu.

Keadaan seperti ini kemudian memunculkan persepsi umum pada sebagian masyarakat yang menilai kualitas anak yang menjalani pendidikan di madrasah, khususnya di MTs, lebih rendah dibanding dengan lulusan SMP umum. Memang pemerintah telah menempuh langkah untuk meningkat kualitas pendidikan yang diselenggarakan di madrasah ini di antaranya dengan mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang ditandai dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Jika pada UU sebelumnya pendidikan ditumpukan kepada sekolah maka dengan keluarnya UU No. 2 tahun 1989 itu dinyatakan pendidikan nasional

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 165.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 168.

mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, dan pendidikan agama.⁴⁹

Meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan secara khusus mengenai pendidikan Islam, namun UU ini dalam prakteknya memberikan ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan Islam khususnya pada satuan pendidikan madrasah. Dalam kasus lembaga pendidikan Islam setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berdasarkan UUSPN tersebut ditempatkan sebagai sekolah berciri khas Islam masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 368/93 dan No. 369/93 pada 22 Desember 1993 yang keberadaan dari Keputusan Menteri Agama ini ditujukan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993.⁵⁰

Meski sudah dikeluarkan peraturan sebagaimana disebut namun persepsi umum tentang lembaga pendidikan Islam yang juga disinggung sebelumnya hingga saat ini masih belum luntur sama sekali. Hal yang paling masih dirasakan adalah kualitas bidang studi ilmu-ilmu umum yang masih kalah dengan sekolah-sekolah umum karena kualitas untuk kelompok pelajaran ini di lembaga madrasah masih kalah dan tertinggal dibanding dengan sekolah umum. Keadaan ini yang kemudian menyebabkan hasil nilai ujian, yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan belajar, yang diperoleh para siswa madrasah masih dan sering kalah dibandingkan dengan hasil yang didapat para siswa dari sekolah umum.

⁴⁹ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Terayon Press, Jakarta, 1994.

⁵⁰ Implikasi dari UUSPN ini terhadap madrasah adalah kurikulum dari semua jenjang madrasah. Secara umum penjenjangan itu paralel dengan penjenjangan yang terjadi pada pendidikan sekolah mulai dari SD, SLTP, dan SLTA. Di bawah peraturan yang terintegrasi tersebut madrasah pada dasarnya lembaga berciri khas Islam, sehingga misalnya pada tingkatan Tsanawiyah (MTs) dikatakan sebagai "Lembaga Pendidikan Lanjutan Pertama Berciri-khas Islam. Hal yang sama juga berlaku pada jenjang tsanawiyah dan aliyah. Maksun Mukhtar, *Op. Cit.*, hlm. 155.

Dengan kualitas pencapaian hasil bidang studi umum yang masih kalah itu, kondisi lanjutan yang harus dialami oleh para lulusan madrasah seringkali harus menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan para lulusan sekolah umum untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.⁵¹ Keadaan-keadaan seperti ini terjadi dikarenakan karena masih kurangnya kualitas guru-guru ilmu pengetahuan umum di madrasah, ditambah lagi dengan minimnya sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pengajaran ilmu-ilmu umum di madrasah.

Keadaan seperti ini yang selanjutnya mengakibatkan banyak orang tua yang lebih memilih dan menyukai anak-anaknya masuk ke sekolah umum karena pertimbangan mata pelajaran umumnya lebih banyak dengan kualitas yang juga lebih baik. Keadaan ini tentu menjadi tantangan bagi madrasah untuk meningkatkan kualitas bidang studi umum dengan tetap mempertahankan kekuatannya sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai benteng moral sebagai ciri khas dari madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.⁵²

2. Kurikulum dan Ekstrakurikuler

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam proses kehidupan berbangsa. Dalam Pembukaan UUD 1945, unsur pendidikan ini ditempatkan pada urutan ketiga (setelah kedaulatan negara [pemerintahan] dan ekonomi[kesejahteraan]) dari cita-cita di atas dinyatakan kemerdekaan bangsa. Karena dalam proses kegiatan berbangsa dan bernegara, pendidikan menjadi pemikiran dan tindakan bersama pada sesama anak bangsa. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hal ini dalam Bab III Pasal 4 ayat (6);

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”⁵³

⁵¹ Husni Rahim, *Op. Cit.*, hlm. 165-166.

⁵² *Ibid.*, hlm. 132.

⁵³ *Undang-Undang RI Nomor: 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003*, CV Mini Jaya Abadi, Jakarta, 2003, hlm. 10.

Di dalam proses pendidikan, ukuran tentang kualitas penyelenggaraan pendidikan juga bisa dilihat pada seperti apa kurikulum diimplementasikan dan dikembangkan. Karena itu implementasi menempati posisi penting, sebab kurikulum dalam konteks pelaksanaan dan pengembangannya merupakan ruh agar suatu lembaga pendidikan tetap eksis dan bisa berkembang.

a. Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Islam

Sebagai suatu perangkat pendidikan, kurikulum merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, dan kedudukannya dalam proses pendidikan adalah sebagai “*the heart of education*”. Karena kedudukan vitalnya maka cukup beragam definisi tentang kurikulum yang dikemukakan para ahli.

Istilah kurikulum sendiri berasal dari bahasa Latin “*currere*” yang dalam bahasa Inggris mempunyai arti *to run* yang berarti (menyelenggarakan) atau *to run the course* yang berarti menyelenggarakan suatu pengajaran.⁵⁴ Harold Rugg, seperti dikutip Rakhmat Hidayat, menyatakan kurikulum sebagai rangkaian pengalaman yang mempunyai manfaat maksimum bagi peserta didik guna mengembangkan kemampuan agar dapat menyesuaikan dan menghadapi berbagai situasi kehidupan. Adapun Hollins Caswell menyatakan kurikulum merupakan susunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses dan prosedur untuk membimbing anak didik menuju pada kedewasaan. Kemudian Ralph Tyler memberi definisi kurikulum sebagai seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya.⁵⁵

Said Hamid Hasan menyatakan, kebanyakan definisi kurikulum bersifat operasional, tetapi pengertian itu tidak lengkap. Ia mengutip pendapat Mac Donald yang menyatakan kurikulum adalah pernyataan

⁵⁴ Rakhmat Hidayat, *Pengantar Sosiologi Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

mengenai tujuan. Selanjutnya Tanner and Tanner menyatakan kurikulum adalah rencana tertulis, dan Saylor dan Alexander menyebut kurikulum sebagai pengalaman nyata yang dialami peserta didik dalam bimbingan sekolah.⁵⁶ Menurut Hamid Hasan, definisi-definisi itu tidak lengkap dan hanya berkenaan dengan salah satu dimensi kurikulum, padahal dimensi kurikulum itu ada tiga yaitu; ide, dokumen, dan implementasi. Secara konseptual, ia memberi definisi kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat.⁵⁷

Pengertian yang bersifat operasional tentang kurikulum ini juga terlihat pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 (ayat 19) dengan menyatakan kurikulum:

“Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”⁵⁸

Sebelumnya negara juga memberikan definisi mengenai kurikulum dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang mendefinisikan kurikulum sebagai:

“Seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.”⁵⁹

Definisi di atas menggambarkan keterkaitan antara apa yang dikembangkan sebagai rencana dan apa yang seharusnya terjadi pada

⁵⁶ Said Hamid Hasan, “Pengembangan Kurikulum Sekolah” dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Imperial Bhakti Utama, Bandung, 2007, hlm. 133.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

⁵⁸ Undang-Undang RI Nomor: 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁹ Rakhmat Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 2.

proses pembelajaran. Definisi itu mengakui, proses pembelajaran adalah proses pelaksanaan dari apa yang direncanakan tetapi ada pengakuan implisit bahwa apa yang terjadi dalam proses tidak harus sama dengan yang direncanakan. Definisi kurikulum dalam UU No. 20 Tahun 2003 juga memberi kelonggaran bahwa kondisi tertentu dalam suatu lingkungan belajar dapat mengubah dan harus mengubah kepada apa yang sudah direncanakan.⁶⁰

Begitu pentingnya kurikulum karena fungsinya dalam menjabarkan idealisme dan cita-cita pendidikan untuk mengarah pada langkah nyata yang akan jadi pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan. Maka dari itu kurikulum memiliki posisi strategis karena menghubungkan idealisme di satu sisi dengan praktik pendidikan di sisi lain.⁶¹ Karena itu dalam proses pendidikan, ukuran tentang kualitas penyelenggaraan pendidikan juga bisa dilihat pada seperti apa kurikulum diimplementasikan dan dikembangkan (inovasi). Karena itu implementasi dan inovasi kurikulum menempati posisi penting dalam pendidikan, karena kedudukannya sebagai ruh dalam lembaga pendidikan agar tetap eksis dan bisa berkembang. Fullan dan Pomfret seperti dilansir Subandijah, menjelaskan, “...*implementation refers to the actual use of an innovation on what an innovation consist of in practice.*”⁶² Selanjutnya Pressman dan Wildavsky (1973) menyatakan kurikulum sebagai “...*accomplishing, fulfilling, carrying out, producing and completing a policy*”. Adapun Tornanatzky dan Johnson membuat batasan implementasi kurikulum sebagai “...*the translation of any tool technique process or method of doing from knowledge to practice*”.⁶³

⁶⁰ Said Hamid Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 133-134.

⁶¹ Muslam, *Pengembangan Kurikulum; Teoritis & Praktis*, Pusat Kajian & Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, Semarang, 2006, hlm. 1

⁶² Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 305.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 306.

Nana S. Sukmadinata menyatakan kurikulum bisa dilihat dalam tiga dimensi; a) sebagai ilmu, b) sebagai sistem, dan c) sebagai rencana.⁶⁴ Sebagai ilmu, kurikulum dikaji sebagai konsep, asumsi, teori, prinsip dasar tentang pendidikan. Selanjutnya sebagai sistem menjelaskan keberadaan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem lain, komponen kurikulum, kurikulum sebagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya. Adapun sebagai rencana, kurikulum tertulis yang menjadi pedoman pelaksanaan proses pendidikan.⁶⁵

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah RI terkait dengan kurikulum ini bisa dilihat dalam Pasal 37 dari UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan kejuruan, dan muatan lokal.⁶⁶

Dalam konteks pendidikan Islam, M. Wahyudin Azies menyatakan bahwa pada lembaga pendidikan Islam seharusnya membangun visi pendidikan Islam yang disusun dan dikelola dengan mempertimbangkan sumber dari unsur-unsur seperti nilai/ajaran Islam, karakter esensial dari sejarah pendidikan Islam, dan rumusan tuntutan masa depan. Dengan kata lain, visi pendidikan Islam untuk saat ini dan di masa depan adalah terwujudnya sebuah sistem pendidikan yang Islami, populis, berorientasi kepada mutu, dan berwawasan kemajemukan.⁶⁷

⁶⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, "Kurikulum dan Pembelajaran", dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* hlm. 98.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Undang-Undang RI Nomor: 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

⁶⁷ M. Wahyudin Azies (Ed.), *Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Logos, Jakarta, 2003, hlm. 107.

Dengan demikian kurikulum dan proses pendidikan yang diterapkan madrasah Islam harus menunjukkan karakter Islaminya dengan mempraktikkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan dan perilaku semua komponen pendidikan baik dari pimpinan, guru dan karyawan, dan siswa. Azies memberi penjabaran mengenai karakter Islam yang harus diterapkan di madrasah dan lembaga pendidikan Islam lain yaitu karakter Islami berupa kesadaran sebagai muslim dalam menjalankan perintah dan larangan agama di setiap waktu dan tempat secara konsisten. Karakter Islami selanjutnya adalah orientasi pendidikan yang bersifat holistik dan tidak terbatas kepada tujuan praktis semata dengan menempatkan aspek spiritual-transendental dalam proses pencapaian dari tujuan pendidikan. Karakter Islami ini juga dapat diartikan sebagai sebuah strategi pembelajaran yang tidak verbalistik sehingga peserta didik dimudahkan dalam mengembangkan keterampilan dan wawasannya secara terpadu.⁶⁸

Terkait dengan kurikulum, seharusnya pada lembaga pendidikan Islam mulai mewujudkan suatu ciri proses pendidikan yang berorientasi kepada mutu/kualitas. Ciri seperti ini menjadi keniscayaan sebagai tantangan saat sekarang dan di masa mendatang yang sangat nyata dikarenakan penghargaan dari masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikan yang ditunjukkan. Kualitas pendidikan itu tecermin pada tataran proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif, dinamis, dan konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sementara hasil pendidikan menunjukkan pada kualitas lulusan dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. jika suatu lembaga pendidikan Islam atau madrasah gagal atau katakanlah tidak berhasil dalam mewujudkan visi seperti ini

⁶⁸ *Ibid.*

maka mereka akan tertinggal dengan lembaga-lembaga pendidikan lain.⁶⁹

Menyikapi pelaksanaan kurikulum di Indonesia, Saekan Muchith menyatakan kurikulum yang selama ini berjalan bisa dikatakan sarat dengan beban yang kemudian berimplikasi kepada adanya proses pembelajaran yang statis, kaku, dan terisolir dari dinamika dan realitas.⁷⁰ Keadaan seperti ini yang menjadi problem umum dalam pendidikan di Indonesia, termasuk gejala dan problem yang dialami oleh lembaga pendidikan Islam. Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku umum, pembelajaran cenderung dimaknai menghabiskan materi pelajaran, terpaku dengan ruang dan waktu, kurang kemampuan dalam merespons persoalan masyarakat yang berujung kepada model lulusan yang verbalis. Penyikapan dan penerapan pelaksanaan kurikulum seperti itu masih berlangsung pada sebagian besar lembaga pendidikan Islam, utamanya di madrasah.

Dalam pandangan Muchith, agar suatu kurikulum benar-benar efektif dalam upaya mewujudkan kualitas pendidikan, termasuk pada lembaga pendidikan Islam, perlu ditunjang beberapa hal: a) Tersedianya tenaga pengajar (guru) yang berkualitas dan profesional; b) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mampu mendukung dalam mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan; c) Tersedianya tenaga penunjang yang cukup seperti tenaga administrasi, pembimbing, laboratorium, teknisi, dan pustakawan; d) Tersedianya dana yang cukup; e) Adanya pola kepemimpinan yang visioner, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada bawahan, dan f) Dukungan dari masyarakat, khususnya dari kalangan wali siswa, secara optimal.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

⁷⁰ Saekan Muchith, *Pengembangan Kurikulum*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 124.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 128.

Mencermati aspek SDM, Muchith juga menguraikan beberapa hal yang menjadi persoalan klasik dalam penyelenggaraan pendidikan, tentunya dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kurikulum pengajaran. Prinsip “*the right man on the right place*” belum berjalan dengan optimal. Misalnya dalam mengisi personil dalam suatu lembaga pendidikan atau orang yang bertugas dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan terkadang sering diambil dari orang-orang yang tidak berkompeten. Penempatan dan pengangkatan seringkali lebih berdasar kepada pertimbangan kepentingan. Keadaan ini berpengaruh kepada aplikasi kurikulum sehingga membuat proses dan penyelenggaraan pendidikan sulit berkembang sebagaimana yang diidealkan.

Sehubungan dengan sekian banyak problem yang masih dialami lembaga pendidikan Islam, maka alternatif penyelesaian yang bisa ditempuh terkait dengan kurikulum, Saekan Muchith mengajukan 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu;

- 1) Merubah pola pengorganisasian kurikulum dari pola subject matter murni menjadi gabungan antara *subject matter* dengan kurikulum terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran tidak terjebak pada munculnya pengetahuan verbalisme ilmu pengetahuan. Selama ini kondisi obyektif pendidikan menunjukkan hanya bisa melahirkan para lulusan yang verbalistik yaitu mereka mampu menyebutkan suatu fakta atau teori namun tidak mampu memberikan argumentasi secara optimal. Untuk itu model pembelajaran perlu dilakukan secara variatif, tidak tergantung pada ruang dan waktu.⁷²
- 2) Materi kurikulum yang diberikan tidak lagi menitikberatkan pada materi logika (benar dan salah), tapi materi kurikulum merupakan hasil dari komposisi proporsional antara materi logika dan etika.

⁷² *Ibid.*, hlm. 139.

Hal ini dikarenakan dalam realitas sosial semua gejala sosial terjadi akibat para lulusan pendidikan subur dalam ilmu logika namun kering dalam ilmu etika. Keadaan ini terjadi sebagai akibat oleh paradigma pembelajaran yang berorientasi kepada kognitif.⁷³

Dalam suatu kurikulum yang diselenggarakan di lembaga pendidikan juga menyertakan inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum dimaksudkan sebagai ide, gagasan, hingga tindakan tertentu di bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru guna memecahkan persoalan pendidikan. Inovasi kurikulum ini berkaitan dengan azas relevansi antara bahan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Karena itu kemunculan inovasi kurikulum dilatarbelakangi adanya tantangan dalam menjawab pelbagai masalah krusial, termasuk keresahan dari pihak-pihak tertentu seperti keresahan guru tentang pelaksanaan kurikulum atau keresahan masyarakat tentang kualitas pendidikan yang dinilai merosot.

Masalah inovasi kurikulum ini mencakup aspek inovasi dalam struktur kurikulum, materi kurikulum, dan inovasi proses kurikulum. Ketiga aspek itu merupakan penggolongan jenis inovasi berdasar komponen sistem pendidikan yang menjadi bidang garapannya. Inovasi kurikulum juga tergantung pada dinamika masyarakat sehingga perubahan di masyarakat berimplikasi pada perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perubahan dalam pendidikan merupakan hal yang harus dilakukan, dan inovasi kurikulum akan muncul ketika lahir pemikiran baru tentang pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Ekstrakurikuler Lembaga Pendidikan Islam

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual

⁷³ *Ibid.*, hlm. 140.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁷⁴

Frasa ungkapan di atas yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, adalah “*agar para peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri ...*”. Di sini dapat diuraikan, pengembangan potensi peserta didik seperti dimaksud pada tujuan pendidikan nasional bisa diwujudkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat memfasilitasi pengembangan potensi anak melalui pengembangan bakat, minat, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Dua dasar pemikiran ini yang menjadi unsur pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstarkurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.⁷⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut juga disertakan definisi/batasan mengenai kegiatan ekstrakurikuler dengan menyatakan:

“Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.”

Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri kemudian ditegaskan pada ayat (2) dari pasal yang dimaksud;

“Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirin peserta didik secara

⁷⁴ Lihat Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷⁵ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 62 Tahun 2014 bagian Menimbang pada item (a) dan (b).

optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.”

Keberadaan dari kegiatan ekstrakurikuler ini ditujukan untuk dapat menemukan dan mengembangkan potensi peserta didik, serta memberi manfaat sosial yang besar dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. di samping itu kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi bakat, minat, dan kreativitas peserta didik yang berbeda-beda.⁷⁶

Terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ditujukan memberi bimbingan dan pengawasan guna pengembangan bakat dan potensi peserta didik itu maka dalam kaitannya dengan teori pendidikan hal ini (kegiatan ekstrakurikuler) bisa dikategorisasikan sebagai “kurikulum berdiferensiasi” yang pengertiannya berbeda dengan pengertian kurikulum secara umum. Satiatava Rizema Putar, dengan mengutip Connie Semiawan, memberikan batasan tentang kurikulum berdiferensiasi ini sebagai kurikulum yang tidak berlaku umum, melainkan dirancang khusus guna memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya bakat tertentu. Pengembangan kurikulum jenis ini terutama menunjuk sesuatu kebutuhan yang berkenaan dengan tumbuh kembangnya kreativitas seseorang (peserta didik).⁷⁷

Kebutuhan terhadap perencanaan belajar melalui kurikulum terdiferensiasi merupakan sebuah keharusan dalam memberikan pengalaman pendidikan kepada para peserta didik yang memang memiliki bakat dan potensi. Meskipun kurikulum umum yang komprehensif sebagian bisa juga digunakan untuk melayani anak-anak yang berbakat dan berpotensi, namun terdapat kebutuhan tertentu yang tidak bisa diperoleh melalui pembelajaran biasa.⁷⁸

⁷⁶ Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 pada Bab Pendahuluan.

⁷⁷ Siatatava Rizema Putra, *Panduan Pendidikan Berbasis Bakat Siswa, Optimalisasi Minat dan Bakat Anak*, DIVA Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 155.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 155-156.

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 62 Tahun 2014 menyatakan kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pada Pasal 3 dari peraturan itu menyatakan kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas; a) Kegiatan ekstrakurikuler wajib, dan b) Kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana yang dimaksudkan adalah pendidikan kepramukaan, sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 62 Tahun 2014 disebutkan pengembangan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan dengan mengacu kepada prinsip partisipasi aktif dan menyenangkan. Partisipasi aktif adalah kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihannya masing-masing. Sementara prinsip menyenangkan adalah kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi para peserta didik.

Pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pelaksanaan dan pembangunan pendidikan nasional dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain sudah pada tempatnya mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang telah diatur tersebut. Adapun bentuk kegiatan ekstrakurikuler pada lembaga pendidikan Islam sebagaimana telah ditetapkan dapat berupa:

- 1) *Krida*, misalnya kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa (LKS), palang merah remaja (PMR), usaha kesehatan sekolah (UKS), pasukan pengibar bendera (paskibra), dan lainnya.
- 2) *Karya ilmiah*, misalnya kegiatan ilmiah remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya.
- 3) *Latihan olah bakat latihan olah minat*, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teknologi informasi, rekayasa, dan lainnya.
- 4) *Keagamaan*, misalnya dengan pengembangan bakat keagamaan seperti tilawatil Qur'an, baca tulis Al-Qur'an, keterampilan berpidato agama, dan sebagainya.

3. Pengembangan Pendidikan Islam

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang seiring masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Madrasah kemudian mengalami perkembangan jenjang seiring dengan perkembangan. Demikian halnya dengan segi materi pendidikan juga telah terjadi perkembangan. Pada awalnya materi pengajaran dalam lembaga pendidikan Islam hanya pembelajaran dalam mengaji kitab Al-Qur'an dan ibadah praktis serta pembelajaran ilmu-ilmu agama lain, dan perkembangan selanjutnya madrasah mengadopsi pelajaran umum yang diajarkan di sekolah umum.

Dalam perspektif yang disampaikan Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf mengenai realitas yang terjadi dan berlangsung pada pendidikan Islam, secara eksternal pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam dewasa ini dan di masa mendatang akan menghadapi tiga isu besar. Ketiga isu besar itu seperti dikatakan Husni Rahim itu adalah globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi.⁷⁹

Bahwa globalisasi tidak sekedar mempengaruhi sistem pasar (ekonomi) namun juga mempengaruhi dunia pendidikan. Dalam dunia

⁷⁹ Husni Rahim, *Op. Cit.*, hlm. 14.

pendidikan, penetrasi budaya global terhadap kehidupan masyarakat direspons secara berbeda yakni dengan sikap permisif, defensif, dan transformatif. Jika penetrasi globalisasi itu disikapi secara permisif, sikap yang muncul adalah cenderung menerima saja pola dan model budaya global pendidikan dengan tanpa memperhitungkan nilai dan substansinya. Sementara bagi yang bersikap defensif, maka yang dimunculkan adalah sikap apriori terhadap capaian budaya global, termasuk juga di dalamnya capaian yang ditunjukkan oleh pendidikan global. Adapun yang menyikapinya secara transformatif adalah dengan berusaha mendialogkan budaya pendidikan global dengan pendidikan lokal sehingga dihasilkan sintesis dalam penyelenggaraan pendidikan yang dinamis dan harmonis.⁸⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan dan lembaga pendidikan Islam mesti peka terhadap isu-isu besar tersebut setidaknya dalam konteks dinamika lokal. Globalisasi yang mengusung semangat keterbukaan namun di dalamnya juga menuntut kompetisi (persaingan) di semua aspek kehidupan. Demikian halnya dengan nilai globalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, di dalamnya juga mengusung dan mempraktekkan orientasi persaingan/kompetisi, baik dalam konteks dan perspektif kompetisi nasional, regional, hingga lokal, antara sesama lembaga pendidikan, tidak ketinggalan juga di antara pada lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah-madrasah.

a. Realitas Lembaga Pendidikan Islam

Kenyataan yang juga menjadi keunikan dari madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah sebagian besar keberadaannya di tangan kepemilikan swasta. Keadaan ini sangat berbeda dengan sebagian lembaga pendidikan umum.⁸¹ Realitas lain yang juga sudah

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 14-15.

⁸¹ Hingga periode tahun 2001 catatan menunjukkan presentase perbandingan antara madrasah negeri dan swasta baik dari tingkatan MI, MTs, dan MA. Pada periode ini hanya ada 4,8% MI berstatus negeri berbanding 95,2% dengan status MI swasta. Jumlah MTs negeri 24,3% sementara 75,7% lainnya berstatus swasta. Adapun MA negeri sebanyak 30% dan 70% adalah MA swasta. Perbandingan dengan lembaga pendidikan dalam lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, keadaannya jauh berbeda dimana tercatat 93,1% SD berstatus negeri sisanya 6.9%

disinggung sebelumnya adalah kebanyakan lokasi madrasah yang berada di kawasan pinggiran, pedesaan, hingga wilayah-wilayah terpencil, dan madrasah-madrasah ini berdiri di wilayah dimana sekolah-sekolah umum yang berada dalam naungan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan tidak berdiri di lokasi-lokasi yang dimaksud. Dari aspek keberadaan dan penyelenggaraannya, madrasah-madrasah bernaung di bawah organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain, selain ada juga yang merupakan kepemilikan keluarga, perorangan, hingga kepemilikan suatu yayasan.

Lembaga pendidikan Islam memang masih tertinggal karena menempati posisi sebagai lembaga pendidikan “kelas ekonomi”. Memang tidak semua lembaga pendidikan Islam berada dalam posisi tertinggal karena fenomena sekarang ini mulai menunjukkan kemajuan sehingga lembaga pendidikan Islam mulai diminati sebagian masyarakat. Dalam hal ini Azyumardi Azra bahkan menyatakan mulai terlihat beberapa kemajuan yang dicapai beberapa lembaga pendidikan Islam itu sebagai proses kebangkitan Islam.⁸²

Mujamil Qomar juga menyatakan, bahwa tumbuhnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam telah bergeser dari pertimbangan ideologis menuju pada pertimbangan rasional. Artinya, pada sebagian masyarakat tidak serta merta memasukkan anak-anaknya ke madrasah tidak lagi karena persamaan identitas sebagai sesama orang Islam semata tapi juga menyertakan aspek pertimbangan atau seleksi.⁸³ Qomar kemudian menyatakan jika lembaga pendidikan Islam dikelola dengan profesional dan sanggup membuktikan keberhasilan serta kemajuan di bidang akademik dan non-akademik maka ini bisa

adalah swasta. Kemudian SLTP negeri tercatat 44,9% dan 55, 1% swasta, dan SLTA negeri 30,5% dan SLTA swasta 69,4%. *Ibid.*, hlm. 131.

⁸² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 70.

⁸³ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam, Strategi baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Gelora Aksara Pratama, Surabaya, 2007, hlm. 45.

dimanfaatkan sebagai momentum terbaik bagi lembaga pendidikan Islam/madrasah. Kenyataan dewasa ini menunjukkan dengan semakin membaiknya taraf hidup masyarakat, utamanya masyarakat Islam, juga paralel dengan munculnya tuntutan dan terjaminnya mutu akademik dalam pemenuhan tuntutan kualitas yang mereka butuhkan di bidang pendidikan.⁸⁴

Karena itu permasalahannya kemudian bukan pihak masyarakat yang tidak memiliki komitmen terhadap agama dengan diwujudkan dalam memilih lembaga pendidikan Islam bagi anak-anaknya, namun hal itu lebih dikarenakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam pemenuhan mutu pendidikan. Malik Fadjar menegaskan, kurang tertariknya masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan Islam itu terjadi bukan karena terjadinya pergeseran dan memudarnya ikatan keagamaan namun lebih dikarenakan pada sebagian besar lembaga pendidikan Islam dinilai kurang menjanjikan dan kurang responsif terhadap tuntutan mutu penyelenggaraan pendidikan Islam baik untuk masa sekarang maupun di masa mendatang.⁸⁵

b. Orientasi dan Strategi Pengelolaan

Sebagai sebuah lembaga pendidikan seharusnya suatu lembaga pendidikan Islam memiliki orientasi yang jelas. Orientasi yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sasaran yang akan mengantarkan kepada tujuan, dan dengan adanya orientasi ini maka akan membuat gerak suatu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan menjadi terarah, teratur, dan terencana.

Terkait dengan orientasi tersebut, A. Malik Fadjar menyatakan ada empat hal yang harus dilihat dalam gerakan pendidikan yaitu; pertumbuhan, perubahan, pembaharuan, dan keberlanjutan.⁸⁶ Unsur-unsur ini akan berkembang dinamis sehingga menuntut kepekaan bagi

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

⁸⁵ A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 250.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 267.

pengelola lembaga pendidikan dalam merespons terhadap unsur-unsur itu melalui penataan strategi baru yang kondusif dalam rangka memajukan lembaga pendidikan Islam. Gejala pertumbuhan dan gejala perubahan lembaga pendidikan akan mempengaruhi suatu lembaga pendidikan di masa mendatang karena tantangan yang dihadapi makin kompleks, dan sejatinya setiap model pendidikan yang dikembangkan dengan apapun bentuknya akan selalu ingin bertahan hidup (*survive*) di tengah masyarakat.⁸⁷ Dan lembaga pendidikan Islam, seperti juga lembaga pendidikan lain, akan menghadapi gejala-gejala yang demikian itu.

Untuk itu pendidikan Islam harus punya orientasi dan visi multidimensi, dan untuk mewujudkan kualitas yang teruji itu A. Malik Fadjar menyebut ada prinsip-prinsip strategis untuk mengembangkan pendidikan Islam yaitu: 1) Orientasi pengembangan sumber daya, 2) Mengarah pada pendidikan multi-kulturalis, 3) Mempertegas misi dasar menyempurnakan akhlak, dan 4) Mengutamakan spiritualitas.⁸⁸

Merespon empat prinsip tersebut, Mujamil Qomar menyatakan keempat prinsip itu mewakili empat dimensi yang terjalin secara integral yang menjadi orientasi pelaksanaan pendidikan Islam yaitu: *dimensi potensial, dimensi kultural, dimensi etik, dan dimensi spiritual* dimana;

- 1) Dimensi potensial akan mengarahkan kepada pengembangan SDM menuju terbentuknya masyarakat berperadaban.
- 2) Dimensi kultural akan mengarahkan gerak pendidikan agar ramah dan terintegrasi dengan budaya lokal sehingga bisa menampilkan bentuk pelaksanaan pendidikan yang inklusif.

⁸⁷ Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁸⁸ A. Malik Fadjar dalam, "Pendahuluan: Strategi Pengembangan Pendidikan Islam dalam Era Globalisasi" dalam M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esha (Ed.), *Horison Baru Pengembangan Pendidikan Islam; Upaya Merespons Dinamika Masyarakat Global*, Aditya Media & UIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2004, hlm. xxii-xxiii.

- 3) Dimensi etik akan mengarahkan alur pendidikan agar benar-benar mengemban misi menanamkan moral bagi seluruh bangsa, dan
- 4) Dimensi spiritual akan mengarahkan proses pendidikan agar memiliki jiwa keimanan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan.⁸⁹

Berdasar orientasi pendidikan tersebut, maka lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan strategi tertentu yang dapat menyehatkan dan bisa mengantarkan kepada kemajuan. Dan strategi yang dipilih itu juga harus mempertimbangkan berbagai kondisi yang dirasakan oleh lembaga pendidikan Islam sehingga menjadi suatu bentuk strategi yang fungsional, yaitu suatu strategi yang sanggup menyelesaikan pelbagai masalah yang sedang dihadapi sehingga strategi tersebut dapat berfungsi layaknya resep yang mujarab.⁹⁰

Terkait dengan strategi di atas HAR. Tilaar menyarankan agar pengelolaan lembaga pendidikan Islam sebaiknya meliputi empat langkah bidang (skala) prioritas: 1) Peningkatan kualitas, 2) Pengembangan inovasi dan kreativitas, 3) Membangun jaringan kerja sama (*networking*), dan 4) Pelaksanaan otonomi.⁹¹ Skala prioritas ini dibutuhkan karena banyaknya problem yang dihadapi lembaga pendidikan Islam seperti problem akademik, fisik, kultural, dan lain-lain. Skala prioritas ini juga yang akan menyeleksi berbagai problem yang ada berdasar tingkat keharusan untuk diatasi, selain juga skala prioritas ini yang akan berkaitan terhadap eksistensi lembaga dan kemajuan lembaga pendidikan.

Sebagai contoh, aspek kualitas sebagai prioritas pertama yang ditekankan oleh suatu lembaga pendidikan Islam, menurut Imam Suprayogo, dalam mengembangkan kualitas setidaknya ada dua sisi yang harus dipenuhi sekaligus yaitu:

⁸⁹ Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

⁹¹ HAR. Tilaar, *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 155.

- 1) Perhatian terhadap daya dukung yang meliputi ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, dana dan manajemen yang teruji dan tangguh; dan
- 2) Harus ada cita-cita, etos, dan semangat yang tinggi dari semua pihak yang terlibat di dalamnya.⁹²

4. Strategi dalam Memenangkan Persaingan

Semakin menguatnya tiga gejala seperti disebut sebelumnya yakni globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi, maka terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, Muhammad Ali menyatakan praktik penyelenggaraan pendidikan bisa dianalogikan dengan proses produksi industri, khususnya dalam industri jasa/pelayanan. Dalam hal ini sekolah/madrasah serta lembaga-lembaga pendidikan lain dapat dipandang sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa kepada pelanggannya.⁹³ Ketika kebanyakan lembaga pendidikan umum, utamanya yang dikelola swasta, telah menempatkan diri sebagai institusi jasa layanan berpola (meski tidak seluruhnya) sebagai korporasi (badan usaha) pendidikan, hanya sebagian kecil madrasah yang punya kesadaran sama. Akibatnya pada madrasah, khususnya madrasah yang berlokasi di pinggiran dan pedesaan, masih jauh dari kesadaran tentang pentingnya hal-hal yang berhubungan dengan kualitas dan daya saing.

Memandang lembaga pendidikan, termasuk lembaga Islam, dalam kacamata korporasi, maka itu bisa diartikan suatu madrasah/sekolah berfungsi sebagai organ produksi jasa pendidikan yang akan dibeli dan dibutuhkan masyarakat. Namun kadang pemahaman ini menimbulkan rasa tidak berkenan karena memunculkan kesan pendidikan dibawa dan dikemas dengan sesuatu yang berkaitan dengan bisnis dan keuntungan.

Buchari Alma mengatakan tidak perlu alergi dengan konsep korporasi

⁹² Imam Suprayogo, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*, STAIN Malang Press, Malang, 1999, hlm. 73.

⁹³ Muhammad Ali, "Penjaminan Mutu Pendidikan", dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan; Bagian II: Ilmu Pendidikan Praktis*, hlm. 346.

pada dunia pendidikan karena hakikatnya konsep bisnis dan pemasaran pendidikan ini tidak melulu berorientasi pada profit atau laba, tapi lebih bertujuan kepada efisiensi dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas suatu lembaga pendidikan.⁹⁴

Ketika dalam satu sisi suatu madrasah/sekolah dipandang atau ditempatkan sebagai institusi yang memproduksi dan menjual jasa kepada pelanggan, di dalamnya juga menyertakan unsur pemasaran yang disebut pemasaran jasa pendidikan. Fatah Syukur dengan melansir Buchary Alma, menyatakan pemasaran pendidikan bisa diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan cara menciptakan dan saling menukar serta memanfaatkan jasa (berupa kualitas pendidikan dan sistem pengajaran yang telah ditawarkan melalui promosi atau penjualan) dengan pemakai jasa pendidikan (orang tua peserta didik/wali murid).⁹⁵

Fatah Syukur juga mengatakan pemasaran pendidikan bertujuan memberi arah dan tujuan di antaranya memenuhi kepuasan konsumen jasa pendidikan/masyarakat). Untuk itu ada 5 faktor penentu dalam mewujudkan kualitas jasa pendidikan yaitu: 1) *Keandalan*; kemampuan tenaga pendidik dalam memberikan jasa dengan terpercaya, akurat, dan konsisten; 2) *Daya tanggap*; kemampuan tenaga pendidik dan lembaga dalam membantu *customer* dan memberikan jasa dengan cepat dan bermakna serta kesediaan mendengar serta mengatasi keluhan pihak *customer*; 3) *Kepastian*; kemampuan memunculkan keyakinan dan kepercayaan atas janji kepada *customer* pada saat sosialisasi dan promosi; 4) *Empati*; kesediaan tenaga pendidik, tenaga administrasi, dan pengelola untuk peduli memberi perhatian secara pribadi dan kemauan serta kemampuan mencari solusi dalam mencapai persetujuan yang harmonis

⁹⁴ Buchari Alma & Ratih Hurriyati (Ed.), "Pemasaran Jasa Pendidikan yang Fokus pada Mutu", dalam *Manajemen Corporate Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus pada Mutu dan Layanan Prima*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 13.

⁹⁵ Fatah Syukur NC, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 187.

dengan sikap peduli dan tulus; dan 5) *Berwujud*; penampilan fasilitas fisik, peralatan pendukung, seperti misalnya gedung dan kebersihannya serta penataan ruang belajar yang rapi.⁹⁶

a. Manajemen dan Pemasaran Pendidikan

Onisimus Amtu memberi definisi manajemen pendidikan sebagai ilmu, seni, profesi, proses hingga aktivitas yang menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pendidikan, yang pada gilirannya ditujukan untuk memandu sumber daya organisasi pendidikan melalui pelbagai proses seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengarahan, dan penggerakan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang ditetapkan.⁹⁷ Dengan begitu pada gilirannya suatu manajemen pendidikan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung strategi pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, bermartabat, dan berdaya saing tinggi.

Mengenai lembaga pendidikan dapat memberi layanan yang sesuai harapan dan kepuasan pelanggannya maka diperlukan kriteria penilaian pada aspek-aspek seperti; hasil belajar, pembelajaran, materi pembelajaran, dan pengelolaan. Moh. Ali dengan melansir AR. Tenner dan IJ. De Toro dalam *Total Quality Management: Three Steps to Continuous Improvement*, menyebutkan penjaminan mutu/kualitas adalah suatu konsep dalam manajemen mutu. Manajemen mutu itu sendiri adalah suatu cara dalam mengelola organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka untuk; 1) Memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten, dan 2) Mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek organisasi.⁹⁸ Dalam bidang pendidikan, logika sebagaimana dalam menerapkan manajemen produksi seperti di atas dapat diterapkan.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 187-188.

⁹⁷ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 25.

⁹⁸ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 348.

Ketika proses pendidikan dan lembaga pendidikan dianalogikan sebagai sebuah produksi (industri jasa), di dalamnya berkaitan dengan aspek manajemen dan strategi pemasaran. Karena itu dalam proses pendidikan terdapat aspek manajemen yang disebut “manajemen pendidikan”. Terkait pengertian manajemen pendidikan ini cukup banyak pendapat, di antaranya T. Bush dalam *Theories of Educational Leadership and Management* (2003) seperti dilansir Onisimus Amtu, yang menyatakan manajemen pendidikan sebagai fungsi eksekutif untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati.⁹⁹ Sementara H. Usman menyebut manajemen pendidikan sebagai seni/ilmu mengelola sumber daya pendidikan guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ikut aktif mengembangkan diri supaya memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰⁰ Selanjutnya M. Pidarta menambahkan, unsur manajemen pendidikan mengandung pengertian sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan sebelumnya.¹⁰¹

Pendapat Moh. Ali yang menyatakan penyelenggaraan pendidikan bisa dianalogikan sebagai proses produksi sebuah industri (industri jasa), Onisimus Amtu menyatakan tidak sepaham. Menurutnya, pengelolaan/manajemen pendidikan tidak serta merta bisa disamakan dengan kegiatan produksi pada industri karena pendidikan membutuhkan perlakuan spesifik dan tindakan obyektif dengan mengedepankan aspek pedagogis yang bertujuan memberdayakan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Dengan kata lain, manajemen

⁹⁹ Onisimus Amtu, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁰⁰ H. Usman, *Manajemen; Teori Praktik & Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 9.

¹⁰¹ M. Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 4.

pendidikan memandu segenap tenaga, pikiran, waktu, dan biaya untuk menciptakan suatu proses dan dinamika pendidikan untuk menuju kepada kemandirian sejati.¹⁰²

Nana S. Sukmadinata menyampaikan pemikirannya, bahwa manajemen pendidikan yang efektif dan efisien bukan hanya dibutuhkan untuk mengelola kegiatan-kegiatan dan faktor-faktor internal semata melainkan juga menyangkut kegiatan dan faktor eksternal. Pelaksanaan kurikulum atau pelaksanaan pendidikan bukan hanya didukung oleh faktor internal atau hal-hal yang ada di suatu lembaga pendidikan (sekolah/madrasah), namun manajemen pendidikan juga membutuhkan dukungan, partisipasi, bantuan, dan kerja sama dengan pihak-pihak di luar sekolah.¹⁰³

Dari uraian di atas, manajemen pendidikan bisa/harus dilakukan dengan memegang prinsip, pemikiran, atau kesadaran seperti: 1) Manajemen tidak melulu dipahami sebagai pengelolaan yang berkaitan dengan produk berupa barang (material) melainkan berupa produk jasa dan layanan. Dalam hal ini pendidikan adalah produk jasa layanan untuk menginvestasi ilmu dan keterampilan yang bisa menghasilkan dan mewujudkan kesejahteraan-kebahagiaan manusia; 2) Kualitas produk pendidikan berlangsung dalam suatu proses dan aktivitas yang menuntut partisipasi dan tanggung jawab pihak-pihak seperti pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan *stake-holder*); 3) Manajemen pendidikan dapat dipandang sebagai suatu strategi dalam meningkatkan mutu/kualitas, relevansi, dan daya saing. Namun bukan berarti pendidikan dipandang secara sempit sebagai komoditas karena pendidikan merupakan suatu proses dan kegiatan yang bersendi dan berdasar pada nilai dan tujuan kemanusiaan; dan 4) Suatu lembaga/organisasi bisa mengadopsi sebagian dari bentuk/prinsip

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Nana S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 25.

manajemen produksi industri dalam melakukan pengelolaan di bidang pendidikan.¹⁰⁴

Dari pemikiran dan kesadaran di atas maka cukup relevan jika dalam proses penyelenggaraan pendidikan, di dalamnya terdapat aspek lain yang disebut sebagai pemasaran pendidikan. Buchari Alma menjelaskan, mungkin sebagian orang berpikiran lembaga pendidikan akan dikomersilkan. Padahal tidak sama dan sebangun antara *marketing* dan *komersial*, walaupun kedua istilah itu identik dengan dunia bisnis. Kegiatan bisnis dapat dilakukan pada dua sektor yaitu mencari/mengejar *profit* (laba) dan tidak mengejar profit. Demikian halnya dengan istilah *marketing*, ada *marketing* perspektif dan orientasi "*profit organization*" dan *marketing* "*non profit organization*". Terhadap kategorisasi ini posisi lembaga pendidikan termasuk ke dalam *non-profit organization*, karena keberadaannya tidak melulu berorientasi profit (laba).¹⁰⁵

b. Strategi Persaingan

Manajemen pendidikan dapat dipandang sebagai suatu strategi untuk meningkatkan mutu/kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Namun, bukan berarti pendidikan dipandang secara sempit sebagai sebuah komoditas/produk dagangan karena pendidikan adalah suatu proses dan kegiatan yang bersendi dan berdasar kepada nilai-nilai dan tujuan kemanusiaan. (perspektif Islam)

Seperti diketahui lembaga pendidikan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk melayani konsumen yang di dalamnya berupa peserta didik dan masyarakat umum yang dikenal sebagai *stakeholder*. Lembaga pendidikan dan pemasaran pendidikan yang dilakukan hakikatnya bertujuan memberi layanan, dan pihak yang dilayani mendapat kepuasan atas layanan itu.¹⁰⁶ Pihak konsumen yang telah "membeli" dan mendapat layanan bukan sekedar membutuhkan

¹⁰⁴ Onisimus Amtu, *Op. Cit.*, hlm. 27-29.

¹⁰⁵ Buchari Alma, *Op. Cit.*, hlm. 30.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 30-31.

layanan atau produk layanan tersebut, melainkan juga ada hal lain yang diharapkan. Sesuatu yang lain itu sesuai dengan citra (*image*) yang terbentuk dalam dirinya.¹⁰⁷

Karena itu penting sekali bagi suatu lembaga pendidikan Islam memberikan informasi publik agar bisa membentuk citra yang baik. Untuk bisa mewujudkan hal ini diperlukan suatu strategi agar bisa meraih keunggulan dalam persaingan jasa layanan pendidikan. Agus Rahayu menyatakan, suatu lembaga pendidikan potensial memiliki keunggulan jika mampu menciptakan dan menawarkan nilai pelanggan yang lebih (*superior customer-value*) atau kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain.¹⁰⁸ Menurutnya, suatu keunggulan baik dari perspektif pasar dan organisasi bisa dicapai dengan menerapkan dua strategi dasar yaitu: 1) Strategi bersaing (*competitive strategy*) dan 2) Strategi kerjasama (*cooperative strategy*).

Keputusan strategi yang akan dipilih dan diimplementasikan oleh lembaga pendidikan Islam itu didasarkan pada modal sumber daya yang dimiliki. Pilihan menempuh strategi bersaing akan bisa efektif jika suatu organisasi memiliki sumber daya yang baik. Namun jika sumber daya yang dimiliki kurang baik/rendah, pilihan yang bisa ditempuh adalah dengan strategi kerja sama. Dan jika situasi sumber daya yang dimiliki ternyata sama pada masing-masing organisasi/satuan pendidikan, maka pertimbangan terhadap pilihan strategi lebih fokus kepada daya tarik pasar.¹⁰⁹

Ada beberapa pemikiran dan langkah yang bisa dikembangkan dan dilaksanakan sebagai strategi pemberdayaan pendidikan Islam yang di dalamnya juga mencakup strategi yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi dan menyikapi persaingan antara sesama lembaga pendidikan, baik dalam konteks

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰⁸ Bucahri Alma & Ratih Hurriyati (Ed.), *Op. Cit*, hlm. 66.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 66-67.

bersaing dengan sekolah-sekolah umum, maupun persaingan dengan sesama lembaga pendidikan Islam/madrasah.

Oleh Mujamil Qomar, beberapa pemikiran dan langkah yang bisa ditempuh untuk tujuan yang dimaksudkan tersebut adalah; menentukan fungsi kelembagaan pendidikan Islam, mengaktualisasikan konsep *minadz-dzulumat ila an-nuur*, pengembangan fungsi reparasi dalam pendidikan Islam, dan menggeser persepsi posisi lembaga pendidikan kelas dua menjadi lembaga pendidikan alternatif.¹¹⁰

Strategi dengan menentukan fungsi kelembagaan pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan Islam yang ingin mencapai dan mendapatkan kemajuan harus menekankan misi dan fungsi akademisnya. Untuk itu lembaga pendidikan Islam/madrasah dituntut senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak boleh mengalami situasi jumud (kemandegan). Untuk itu menjadi keharusan untuk selalu mengembangkan pemikiran, pemahaman, gagasan, ide, konsep, wawasan, teori dan strategi sehingga akan selalu bisa dimunculkan perubahan dan pembaharuan yang bersifat positif-konstruktif. Suatu lembaga pendidikan yang berhasil mewujudkan fungsinya akan menghargai inisiatif, pemikiran kritis, kreativitas, dan produktivitas.¹¹¹

Strategi kedua, mengaktualisasikan konsep *minadz-dzulumat ila an-nuur*, pada dasarnya ditujukan kepada diwujudkannya spirit dan proses transformatif pada lembaga pendidikan. Madrasah/sekolah Islam harus didesain dan ditargetkan untuk bisa mentransformasi diri menuju kepada keadaan yang positif-konstruktif, kreatif-produktif, dan dinamis-progresif. Menurut Mujamil Qomar, transformasi ini setidaknya ditujukan kepada tiga pihak yaitu; tenaga pendidik, manajemen lembaga pendidikan, dan peserta didik.¹¹²

¹¹⁰ Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 83, 85, dan 89.

Strategi ketiga, pengembangan fungsi reparasi dalam pendidikan Islam adalah dimaksudkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam/madrasah harus memiliki kemampuan dalam memperbaiki kondisi peserta didik. Jika siapapun yang terlibat dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran di madrasah mampu mewujudkan perubahan dan perbaikan terhadap peserta didik maka sebenarnya mereka telah menghadirkan suatu pendidikan yang sejati.¹¹³

Dan strategi terakhir, menggeser persepsi posisi lembaga pendidikan “kelas dua” menjadi lembaga pendidikan alternatif. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa selama ini posisi pendidikan Islam sering disebut sebagai pendidikan kelas dua, untuk menyebut sebagai lembaga pendidikan yang masih tertinggal dibanding dengan lembaga pendidikan lain. Mengejar ketertinggalan memang sesuatu yang sangat berat, namun jika ada niat bulat dan kemauan untuk bekerja keras untuk mewujudkannya dengan melakukan gebrakan, terobosan, dan lompatan maka semua masih serba mungkin. Jika hal ini mampu terwujud maka lembaga pendidikan Islam/madrasah tidak lagi dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua yang serba tertinggal namun akan menjelma menjadi suatu lembaga pendidikan alternatif yang diterima dan diminati masyarakat.¹¹⁴

D. Penelitian Terdahulu

Selain pemaparan beberapa teori yang berkaitan dengan dasar pemikiran dari judul tesis yang diajukan, berikut disertakan pula pemaparan singkat dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Beberapa dari hasil penelitian itu di antaranya;

1. Tesis Dedik Fatkhul Anwar berjudul “*Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta*” pada Program Studi Pendidikan

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 95-96.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

Islam Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.¹¹⁵

Hasil penelitian menyebutkan, dalam upaya meningkatkan peminat layanan jasa pendidikan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta digunakan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pemasaran secara langsung dilakukan dengan cara pemanfaatan IT, membuat brosur/pamflet, memanfaatkan media cetak, dan lain-lain. Sementara pemasaran secara tidak langsung dilakukan dengan cara-cara seperti optimalisasi kegiatan madrasah di masyarakat, kiproh para guru, ustad, dan karyawan di lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Selain itu juga lembaga pendidikan terkait melakukan langkah-langkah lain seperti merumuskan strategi persaingan yang di dalamnya berupa kegiatan dalam melakukan segmentasi pasar dan menyusun target. Tidak lupa juga ditempuh langkah berupa informasi dan publikasi berbagai kelebihan dari produk layanan pendidikan dari lembaga pendidikan terkait yang menjadi obyek penelitian.

2. Tesis Syafiur Rahman berjudul "*Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan (Studi Analisis di MAN 3 Kota Cirebon*" pada program studi Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.¹¹⁶ Penelitian ini mengangkat topik pemasaran pendidikan yang selama ini relatif diabaikan lembaga pendidikan madrasah di tengah persaingan antar sekolah dan madrasah yang makin ketat. Hasil penelitian yang dilakukan di MAN 3 Cirebon menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dari para lulusannya, madrasah bersangkutan melakukan dua pola yaitu;

¹¹⁵ Dedik Fatkhul Anwar, "*Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Peminat Layanan Pendidikan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta*", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

¹¹⁶ Syafiur Rahman, "*Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan (Studi Analisis di MAN 3 Kota Cirebon)*", Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Pola pertama, strategi pemasaran dengan melakukan dua model: a) Pemasaran secara langsung yaitu dengan promosi dan publisitas, pemanfaatan IT, media cetak dan elektronik, hingga aktivitas *door to door* ke setiap sekolah dengan keterlibatan para alumni; b) Pemasaran secara tidak langsung dengan wujud melakukan penawaran berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan pelatihan dan pengembangan kemampuan bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris), mengadakan kegiatan pelatihan, diskusi ilmiah, serta kegiatan lain yang dipandang bisa membekali para peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun yang akan untuk terjun dalam kehidupan masyarakat.

Pola kedua, implementasi dari pemasaran yang dilakukan dengan langkah yaitu; a) Merumuskan strategi persaingan yaitu dengan melakukan identifikasi segmentasi pasar, *targeting*, dan *positioning*; b) Membuat taktik pemasaran dengan cara menerapkan teori bauran pemasaran dengan cara menerapkan produk-produk yang berkualitas di madrasah yang menjadi obyek penelitian.

3. Tesis Qamarudin Dwi Antoro berjudul “*Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu di MI Muhammadiyah Basin, Kebon Arum, Klaten*” pada program studi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.¹¹⁷ Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan manajemen pemasaran yang dilakukan di MI Muhammadiyah Basin, Kebon Arum, menggunakan *marketing mix* berupa: 1) *Product*, mewujudkan generasi muslim yang berilmu, berprestasi, yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan berbudaya santun; 2) *Price*, menggunakan kesimpulan harga-mutu; 3) *Place*, lokasi madrasah yang tidak terlalu jauh dan mudah diakses dan dijangkau; 4) *Promotion*, pembentukan panitia, sosialisasi, dan iklan melalui media; 5) *People*, sebagian besar tenaga pengajar berlatar belakang sarjana; 6)

¹¹⁷ Qamarudin Dwi Antoro, “*Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu di MI Muhammadiyah Basin, Kebon Arum, Klate*”, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Process, penyelenggaraan pendidikan didukung oleh penerapan KTSP dan Kurikulum 2013, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembinaan siswa.

Selanjutnya hasil yang dicapai setelah memaksimalkan modal-modal pemasaran di atas adalah: 1) Produk, dalam kegiatan ekstrakurikuler para siswa mampu mempraktekkan apa yang diminatinya, pada kegiatan tambahan menghasilkan capaian memuaskan dalam berbagai kompetisi antar lembaga pendidikan; 2) Terjalin komunikasi yang sangat baik antar sesama warga madrasah (pimpinan, jajaran pendidik, jajaran staf administrasi, dan para peserta didik); 3) Meningkatnya mutu karena terselenggaranya kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

4. Tesis Chusnul Azhar pada Program Pascasarjana Pendidikan Islam dengan konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga dengan judul “*Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kader di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta*”.¹¹⁸ Jelas sekali, dalam tesis ini menguraikan tentang pengembangan kurikulum untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat ideologi keorganisasian yaitu organisasi Islam Muhammadiyah. Disebutkan dalam hal pengembangan kurikulum untuk tujuan kaderisasi di lembaga pendidikan yang menjadi obyek penelitian tersebut secara garis besar dilakukan dengan tiga cara yaitu; a) Melalui penyelenggaraan pendidikan, b) Melalui aktivitas organisasi, dan c) Membangun dan mengembangkan jaringan organisasi. Titik fokus dari penelitian ini dan judul tesis yang diajukan adalah pada aspek pengembangan kurikulum.
5. Tesis M. Farhan Pamuji yang berjudul “*Manajemen Public Relation Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan di SMA Takhassus Al-Qur’an Kalibeber, Wonosobo*” pada

¹¹⁸ Chusnul Azhar, “*Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kader di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta*”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Program Pascasarjana Pendidikan Islam dengan konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.¹¹⁹

Tesis ini menyatakan manajemen sekolah harus mulai mengelola kegiatan *public relation* dengan serius dan profesional. Hasil penelitian yang dilakukan di SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeber, Wonosobo, itu menunjukkan pelaksanaan *public relations* di SMA tersebut menggunakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen di antaranya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian. Fungsi-fungsi tersebut mampu membuat kegiatan *public relation* di SMA Takhassus Kalibeber berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini juga yang kemudian berhasil menumbuhkan persepsi positif di kalangan masyarakat terhadap sekolah bersangkutan, sehingga pihak masyarakat mau bekerja sama dengan SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeber dalam merealisasikan tujuan sekolah dalam upaya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat.

Beberapa penelitian di atas, secara garis besar memfokuskan penelitian pada ranah pemasaran jasa pendidikan dan manajemen pemasarannya melalui berbagai macam strategi. Walaupun dalam penelitian terdahulu terdapat satu penelitian tentang pengembangan/inovasi kurikulum namun pengembangannya untuk tujuan kaderisasi dan bukan untuk menghadapi persaingan antar lembaga pendidikan.

E. Kerangka Berpikir

Sebuah lembaga pendidikan dikatakan mampu bertahan manakala tiga aspek berikut ini dapat berhasil dicapai. *Pertama*: kepercayaan masyarakat semakin meningkat/tinggi, *kedua*: banyak prestasi yang dicapai oleh siswa, *ketiga*: dari segi kuantitas siswa dapat dipertahankan atau cenderung meningkat. Hal ini dikuatkan oleh Mujamil Qomar bahwa lembaga

¹¹⁹ Farhan Pamuji "Manajemen Public Relation Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan di SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeber, Wonosobo", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

pendidikan di masa yang akan datang tantangannya semakin kompleks. Setiap model pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk apapun akan ingin selalu bertahan hidup (*survive*) di tengah-tengah masyarakat.¹²⁰

Lembaga pendidikan Islam harus dikelola melalui strategi tertentu yang dapat menyehatkan dan bisa mengantarkan kepada kemajuannya. Strategi yang dipilih harus mempertimbangkan berbagai kondisi yang dirasakan lembaga pendidikan tersebut, sehingga dapat berfungsi menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²¹

Strategi yang digunakan dalam perspektif lembaga pendidikan Islam digunakan untuk meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. Strategi ini digunakan untuk memperluas pemasaran pendidikan yang pada hakikatnya untuk memberi pelayanan terhadap kepuasan konsumen.¹²² Dalam situasi demikian akan memunculkan citra (*image*) yang terbentuk pada lembaga pendidikan. Pencitraan penting dilakukan agar bisa meraih keunggulan dalam persaingan jasa layanan pendidikan.

Pemilihan strategi bersaing bisa efektif apabila memiliki cita-cita, etos dan semangat tinggi dana dan sumber daya yang baik. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari tenaga pendidik, peserta didik, pengelolaan atau manajemen yang teruji dan tangguh.¹²³

Mujamil Qomar mensaratkan strategi pembaharuan yang dilakukan dalam strategi persaingan hendaknya bersifat positif-konstruktif mampu menghargai inisiatif, pemikiran kritis, kreativitas dan produktivitas. Kemudian dapat mengaktualisasikan konsep *minadz-dzulumat ila an-nuur*, mampu mengembangkan fungsi reparasi dalam pendidikan Islam, sehingga menjadi lembaga pendidikan alternatif yang diminati masyarakat.

Konsep strategi yang ada diejawantahkan/diproses melalui *inovasi kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler*. Inovasi kurikulum mencakup aspek struktur kurikulum, materi kurikulum, dan inovasi proses kurikulum. Inovasi

¹²⁰ Mujamil Qomar, *Loc. Cit.*, hlm. 48.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹²² Buchari Alma, *Loc. Cit.*, hlm. 30-31.

¹²³ Imam Suprayogo, *Loc. Cit.*, hlm. 73.

kurikulum muncul ketika lahir pemikiran baru tentang pengembangan kurikulum yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Lembaga pendidikan Islam menurut Wahyudin Azies dalam mengembangkan kurikulum harus menunjukkan karakter Islami dengan mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan dan perilaku semua komponen pendidikan baik dari pimpinan, guru karyawan dan siswanya. Siswa dimudahkan dalam mengembangkan keterampilan dan wawasannya secara terpadu dan mewujudkan ciri proses pendidikan yang berorientasi pada mutu/kualitas.¹²⁴

Sedangkan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Islam dengan tujuan agar para peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri, sehingga dapat ditemukan potensi peserta didik, dari banyak kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ditawarkan, melalui partisipasi aktif peserta didik, disajikan oleh pembimbing secara menyenangkan. Sehingga dapat tergambar kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

¹²⁴ M. Wahyudin Azies., *Loc. Cit.*, hlm. 107.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

